



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT KERJA
KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI SOSIAL RI**

Tahun Sidang	: 2020/2021
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari, Tanggal	: Rabu, 23 September 2020
Pukul	: 14.20-16.05 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Ketua Rapat	: H. Yandri Susanto, S.Pt. (Ketua/Fraksi PAN)
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: 1. Penyesuaian RKA K/L. Kementerian Sosial RI Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran. 2. Isu-Isu Aktual.
Anggota yang Hadir	: 45 Anggota dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI

PIMPINAN:

1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)
2. H. M. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., Me.Con
(F-PDI Perjuangan)
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlis Sidik, MPA. (F-Partai
Gerindra)
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

6. I Komang Koheri, SE.
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.
8. Selly Andriany Gantina, A.Md.
9. Umar Bashor
10. Inna Ammania
11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
13. H. Rachmat Hidayat, SH.
14. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

17. H. John Kenedy Azis, SH.
18. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
19. Mohammad Saleh, SE.
20. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
21. Muhammad Fauzi, SE.
22. Dra. Hj. Idah Syahidaj Rusli Habibie, M.H.
23. Muhammad Ali Ridha

FRAKSI PARTAI GERINDRA

24. M. Husni, S.E., M.M.
25. Dr.h. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
26. Abdul Wachid
27. Drs. H. Zainul Arifin
28. H. Iwan Kurniawan, SH.
29. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

30. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM.Tr.
31. Dra. Delmeria
32. Nurhadi, S.Pd.
33. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.
34. Satori, S.Pd.I., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

35. H. Maman Imanul Haq
36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
37. H. An'im Falachuddin Mahrus

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

38. Drs. H. Achmad, M.Si.
39. Harmusa Oktaviani, S.E.
40. Wastam, S.E., S.H.
41. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
42. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

43. KH. Bukhori, LC., MA.
44. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
45. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
46. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.
47. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

48. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
49. H. Sungkono
50. M. Ali Taher

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

51. KH. Muslich Zainal Abidin
52. H. lip Miftahul Choiry, S.Pd.I.

**Anggota yang Izin
Undangan**

- : 5 orang Anggota Komisi VIII DPR RI
: Menteri Sosial RI beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT/ F- PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pak Menteri Sosial Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.

Yang terhormat para Pimpinan para Anggota Komisi VIII baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual di rumah masing-masing.

Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa mengikuti Rapat Kerja pada siang hari ini pada keadaan sehat *wal'afiat*. Oleh karena itu doa kita harapan kita semua berjalan dengan baik dan lancar. Tidak terlalu lama Pak Menteri karena zaman Covid-19 ini kita tidak usah bertele-tele kalau sudah jelas ngapain terlalu banyak cakap kan begitu? Oleh karena itu supaya lancar marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing bagi yang beragama Islam kita baca *ummul kitab Al Fatihah*. Selesai. Terima kasih.

Pak Menteri yang kami hormati beserta seluruh jajaran.

Para Pimpinan dan Anggota.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara Rapat-Rapat DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020/2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Antara Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi tanggal 13 Juli tahun 2020 dan Rapat Internal Komisi VIII tanggal 18 Agustus bahwa hari ini Rabu 23 September 2020 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan agenda penyesuaian RKA K/L tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran serta isu-isu aktual.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi VIII sekarang sudah hadir 14 anggota secara fisik mungkin sebagian belum masuk; 28 secara virtual dari 9 fraksi. Tapi kami tegaskan kembali dari arahan Pimpinan DPR Pak Menteri, nanti yang bertanya kecuali PDIP 2 orang yang lain satu-satu. Jadi silakan masing-masing Kapoksi bermusyawarah kalau ada yang mau berbicara jatahnya seperti itu baik yang virtual maupun secara fisik. Oleh karena itu dari yang sudah hadir dan fraksi yang sudah hadir berdasarkan tata tertib DPR Pasal 251 Ayat 1 kuorum telah tercapai oleh karena itu izin Pak Menteri dan para Anggota/para Pimpinan izinkan kami membuka Raker ini dengan mengucapkan *Bismillahirrahmannirrahim* Rapat Kerja ini saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, agenda kita pada hari ini

1. Pertama pengantar dari Pimpinan rapat 2.
2. yang kedua penjelasan dari Pak Menteri terhadap agenda yang sudah saya bacakan tadi.
3. Yang ketiga tanya jawab saran dari Anggota termasuk dari meja Pimpinan.
4. Yang ke empat, kita akan membuat kesimpulan dari Rapat Kerja kita hari ini.
5. Yang kelima tentu penutup.

Apakah agenda yang saya bacakan tadi bisa sepakati.

(RAPAT: SETUJU)

Baik kita mulai tadi jam 14.25 kita akhiri jam 16.00 ya? Mudah-mudahan sebelum jam 4 sudah selesai Pak Menteri. Sekali lagi para Anggota kalau sudah jelas tidak usah banyak tanya setuju ya setuju kesimpulan saja nanti kalau setuju. Karena kelihatannya Pak Menteri Sosial ini sudah sangat siap.

Baik Pak Menteri pada rapat hari ini kita selenggarakan berdasarkan Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/08459/DPR RI/VII 2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal penyampaian rancangan jadwal pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 dan berdasarkan Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa ruang lingkup tugas Komisi di bidang anggaran antara lain mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut pada Rapat Kerja hari ini memiliki makna strategis karena membahas hasil penyesuaian. Tapi nanti kalau tidak ada yang di sesuaikan Pak Sekjen atau Pak Menteri mudah-mudahan tidak ada perubahan kecuali ada hal-hal yang memang perlu kita buka kemungkinan-kemungkinan untuk penyesuaian anggaran.

Rencana kerja anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 dan sekaligus membahas isu aktual termasuk kebijakan apa yang sedang yang akan di laksanakan dalam rangka penanganan dampak sosial Covid-19 19 yang sampai saat ini belum selesai bahkan cenderung meluas dan meningkat. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang maka penyusunan RKA K/L tahun anggaran 2021 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Postur APBN tahun anggaran 2021 banyak terkait dengan program penganggaran dan penanggulangan pandemi Covid-19 19 yang akan dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Kemudian Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI mengenai penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial RI tahun 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran merupakan serangkaian proses pembahasan anggaran mulai dari pembicaraan pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 24 Juni 2020 Menteri Sosial Republik Indonesia menyampaikan Pagu Indikatif dilanjutkan tanggal 3 September 2020 dilakukan Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang membahas Pagu Anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021 sebesar Rp.92.817.590.291.000. Ini sungguh luar biasa ada kenaikan yang sebelumnya itu Pagu Anggarannya Rp.62.024.299.578.000 ada kenaikan Rp.30.793.320.713.000. Artinya Pak Menteri ini sejarah dalam anggaran di DPR ini bahwa Kementerian sosial naik sekitar 49.65% saya kira ini mudah-mudahan bisa maksimal kita laksanakan nanti ketika sudah disetujui menjadi program kerja atau anggaran dari Kementerian sosial.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021 di harapkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan mendesak pembangunan di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan kajian kebijakan dan rencana strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kebijakan rencana kerja dan anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia harus di arahkan untuk penyelesaian permasalahan pembangunan sosial termasuk dampak Covid-19 19. Dengan demikian rencana kerja dan Kementerian sosial dapat berkontribusi secara optimal terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu Pak Menteri pada Rapat Kerja pada hari ini kami mengkonfirmasi yang pertama bagaimana postur anggaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2021 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran dan bagaimana alokasi anggaran untuk program prioritas nasional dan program regular atau program *multi years*.

Yang kedua bagaimana kebijakan dan langkah antisiapasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan tahun 2021 di kaitkan dengan isu aktual serta permasalahan utama tahun 2020 utamanya dampak pandemi Covid-19 19 seperti yang saya sampaikan tadi Pak Menteri Covid-19 ini belum tahu kapan akan berakhir penyebarannya bagaimana, siapa yang terpapar, yang terdampak tidak pilih kasih, tidak pilih umur tidak pilih jenis kelamin tidak pilih suku bangsa semua hampir terkena. Tapi dari anggaran 92 Triliun itu kita berharap Pak Menteri bisa juga melakukan lompatan-lompatan yang lain Pak. Sehingga kami dari Komisi VIII selalu saja mendukung dan mendorong Kementerian Sosial untuk melakukan inovasi terutama kita juga tidak boleh lupa disamping tugas Covid-19 Kementerian sosial juga punya tugas-tugas yang lain yang mungkin itu perlu juga kita perhatikan tidak kita abaikan.

Oleh karena itu dari anggaran yang ada ini tentu kami dengan seiring waktu nanti berjalan Pak Menteri silakan Pak Menteri dengan leluasa untuk merealokasi atau menggeser atau memindahkan dan lain sebagainya prinsipnya itu untuk kesejahteraan sosial dan ada kaitannya dengan hajat orang banyak saya kira tetap akan mendorong kebijakan Pak Menteri dan sekali lagi mudah-mudahan itu tidak kita menjadikan hambatan yang serius untuk Pak Menteri melakukan relaksasi atau ruang untuk melakukan apa namanya realokasi anggaran.

Yang pasti anggarannya sudah sangat besar. Tetapi kita juga tidak ingin terlena dengan Covid-19 19 ini seolah-olah hanya Covid-19 19 yang menjadi masalah tapi kami yakin permasalahan di Kemensos sangat banyak balai-balai kemudian apa lagi politikes dan lain sebagainya itu gedung-gedung ya Pak Sekjen ya? Jangan nanti orang mati itu bukan karena Covid-19 karena tertimpa oleh gedung yak an? Atau orang-orang yang cacat yang distabilitas tidak perhatikan bukan mati karena korona tapi karena kita tidak perhatikan.

Jadi saya kira anggarannya yang besar ini coba di atur sedemikian rupa Pak Menteri intinya kita bersinergi saja. Selama itu untuk hajat hidup orang banyak saya kira kita ini semuanya merah putih Pak Komisi VIII ini sungguh luar biasa masalah keadilan pemerataan dan lain sebagainya itu menjadi konsen kami.

Oleh karena itu Pak menteri silakan nanti dipaparkan dan ruang itu sudah kami berikan seluas-luasnya yang pasti tolong di sampaikan secara terbuka pada kami di Komisi VIII. Oleh karena itu demikian saja dari Pimpinan Rapat dan tiba saatnya kita dengarkan apa namanya uraian dari Pak Menteri terhadap agenda yang sudah kita sepakati pada hari ini kepada Pak Menteri kami persilakan.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (JULIARI P. BATUBARA):

Izin Pak Ketua

**Yang terhormat Ketua dan para wakil Ketua Komisi VIII DPR RI;
Yang terhormat para Anggota Komisi VIII DPR RI;
Ibu Bapak Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Selamat siang.

Mengawali pertemuan ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita sehingga kita dapat memenuhi undangan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI pada hari Rabu 23 September 2020 dengan agenda yang telah disetujui.

1. Yang pertama adalah penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
2. Yang kedua isu-isu aktual dan solusinya.

**Yang terhormat Pimpinan sidang Ibu/Bapak Anggota Dewan.
Hadirin yang berbahagia.**

Sebagaimana pokok bahasan dari Rapat Kerja hari ini, kami akan menyampaikan materi dengan agenda di atas:

1. Yang pertama sistematis dalam pemaparan kami adalah penyesuaian RKKL Kementerian Sosial sesuai hasil pembahasan dengan Badan Anggaran.
2. Isu-isu aktual dan solusinya.

Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu penyesuaian RKKL Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan pembahasan dengan Badan Anggaran DPR RI. Untuk Pagu Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2021 adalah Rp.92.817.590.291.000. Hasil rapat dengan Badan Anggaran, anggaran sebesar itu adalah 99.21%-nya untuk belanja non operasional antara lain terdiri dari belanja barang, belanja modal, dan yang terbesar adalah belanja bantuan sosial. 0.55%-nya adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp.511.925.510.000. 0.24% dari anggaran tersebut di atas adalah untuk belanja barang operasional yaitu sebesar Rp.220.635.766.000 atau di *breakdown* yang pertama untuk perlindungan sosial yaitu sebesar Rp.91.122.985.946.000 dan untuk dukungan manajemen sebesar Rp.1.694.604.345.000. Jadi dari postur anggaran dapat kita lihat bahwa hampir seluruh dari anggaran tersebut adalah untuk kegiatan bidang perlindungan sosial.

Untuk distribusi anggaran per unit kerja Eselon I untuk tahun anggaran tahun 2021 apabila dibandingkan dengan tahun anggaran atau dibandingkan dengan anggaran Kemensos per hari ini antara lain untuk:

1. Sekretariat Jenderal 355 Miliar sekian di tahun 2020. Di rapat terakhir dengan Banggar menjadi Rp.2.052.314.886.000. Ada perubahan sebesar 107 Juta Rupiah dari surat yang kami kirimkan ke Kementerian Sosial atau ke DPR RI.
2. Kemudian untuk Inspektorat jenderal hasil rapat terakhir dengan Badan Anggaran yaitu sebesar Rp.33.408.503.000 ada perubahan sebesar 10 juta rupiah di bandingkan dengan surat Menteri Sosial.
3. Kemudian Dirjen Pemberdayaan Sosial sebesar Rp.406.207.360.000 ada perubahan sebesar Rp50Juta dari surat Menteri Sosial yang terdahulu.
4. Ditjen Rehabilitasi Sosial sebesar Rp.1.241.485.787.000 ada perubahan sebesar Rp276juta di bandingkan dengan surat dari Menteri Sosial.
5. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial hasil rapat dengan Banggar menjadi Rp.30.773.505.300.000 ada perubahan sebesar 220 juta rupiah dibandingkan dengan surat dari Menteri Sosial.
6. Ditjen Penanganan Fakir Miskin menjadi sebesar menjadi Rp.57.926.152.505.000 ada perubahan sebesar 670 Juta Rupiah dibandingkan dengan surat dari Menteri Sosial.
7. Kemudian yang terakhir untuk Badiklit Pensos hasil rapat dengan Banggar menjadi Rp.384.515.950.000. Ada perubahan sekitar Rp.7.000.000 sehingga hasil rapat terakhir dengan Badan Anggaran DPR RI untuk tahun anggaran tahun 2021 adalah

Rp.92.917.590.291.000. Apabila di bandingkan dengan anggaran per hari ini untuk tahun 2020 yaitu Rp.134.008.919.116.000.

Sesuai dengan target prioritas nasional yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang masuk dalam domain Kementerian Sosial. Target-target tersebut antara lain atau anggaran tersebut adalah antara lain untuk mencapai sebagaimana yang tercantum mungkin kami hanya akan membacakan yang besar-besar saja.

Yang pertama jumlah KPM yang memperoleh bansos pangan oleh program sembako yaitu sebesar 18.800.000 KPM. Jumlah KPM yang memperoleh bantuan sosial tunai selama 6 bulan dari bulan Januari sampai Juni yaitu 10 Juta KPM. Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH yaitu sebesar 10 Juta KPM.

Terkait dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang akan kami lakukan di tahun 2021 akan mencakup sebanyak 109.600.000 jiwa kalau dalam keluarga kurang lebih sekitar 41 Juta keluarga berarti ada peningkatan sekitar 29 Juta keluarga dari yang saat ini ada di dalam DTKS.

- Kemudian di rehabilitasi sosial antara lain adalah 48.000 jiwa penyandang distabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan juga perlindungan sosial.
- 47.000 jiwa mendapatkan literasi khusus, program literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra.
- 35.000 jiwa lanjut usia atau lansia yang mendapatkan program rehabilitasi sosial lanjut usia baik yang berada di dalam balai-balai rehabilitasi kami ataupun yang di luar rehabilitasi
- 7.320 tenaga kerja sosial kecamatan yang mendapatkan pemberdayaan.
- 220.000 jiwa warga masyarakat di rawan bencana yang akan mendapatkan lokasi bantuan berupa kesiapsiagaan dan mitigasi.

Sisanya seperti yang tercantum adalah target-target yang akan kami capai atau kami targetkan di tahun 2021 sesuai dengan prioritas nasional yang masuk dalam domain Kementerian Sosial Republik Indonesia dan dengan anggaran yang sudah di bahas oleh dengan Badan Anggaran.

Kemudian target atau program yang masuk prioritas nasional lainnya antara lain membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Sebanyak 130.000 jiwa korban bencana alam yang akan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Program atau prioritas nasional memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transportasi layanan publik adalah 200 jiwa warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi. Ini adalah bencana non alam.

Kemudian prioritas nasional terkait dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar 9.000 keluarga penerima manfaat yang akan memperoleh bantuan rehabilitasi rumah atau yang kita sebut sebagai Rutillahu.

Kita beranjak dari agenda yang kedua dari pemaparan kami adalah isu-isu strategis lainnya dan solusinya.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati.

Kebutuhan anggaran tahun anggaran 2021 kami memang belum ideal sesuai dengan kacamata atau perspektif kami. Oleh karena itu kami mohon dukungan dan juga arahan dari Komisi VIII DPR RI antara lain.

1. Pertama, penguatan revitalisasi balai sosial dengan standar internasional.
2. Yang kedua penguatan kesiapsiagaan yaitu berupa bantuan darurat peralatan evakuasi kendaraan siaga bencana kampung siaga bencana atau KSP dan pembangunan logistik.
3. Yang ketiga yang juga belum teralokasi dalam pagu anggaran tahun 2021 adalah penambahan target program kewirausahaan sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
4. Penguatan Puskesmas pusat kesehatan sosial sebagai ujung tombak pelayanan, penanganan, pengaduan dan rujukan PPKS.
5. Peningkatan target untuk program rumah tidak layak huni.
6. Yang juga belum teralokasikan dalam Pagu Anggaran tahun 2021 adalah penguatan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Yang ke tujuh dan terakhir adalah rehabilitasi gedung atau bangunan dan sarana prasarana perkantoran termasuk penyiapan-penyiapan ruangan *open space* dukungan di kehumasan dan publikasi pengelolaan sumber daya manusia dan juga penyusunan perundang-undang dan bantuan hukum.

Ini juga di sebabkan antara lain Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat adalah rencana dari realokasi program sembako yang tertunda akibat pandemi Covid-19 sehingga rencana tersebut tidak bisa kita jalankan.

Demikian penjelasan yang kami sampaikan perihal penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial tahun 2021 sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI serta isu-isu aktual dan lainnya. Untuk selanjutnya kami mohon dukungan dan arahan dari Komisi VIII DPR RI yang terhormat sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami kembalikan ke meja Pimpinan yang terhormat.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Menteri. Pemaparannya sangat singkat jelas dari anggaran 92,8 Triliun mudah-mudahan nanti banyak tambahan di anggaran tahun yang berjalan Pak dan yang paling penting tadi saya kira isu-isu aktual di antaranya penguatan revitalisasi Balai Rehsos dan standar internasional. Saya kira ini juga penting Pak bagian fakta bahwa kita ini memang siap dengan segala kondisi nanti ketika ada persoalan di kemudian hari termasuk rehabilitasi gedung dan bangunan serta sarana prasarana. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian juga Pak Menteri jangan kita Covid benar kita harus

konsentrasi tapi di sisi lain Pak bahwa tugas Kemensos itu juga ada tugas-tugas yang lain pertama ya tadi gedung-gedung, panti dan lain sebagainya itu.

Oleh karena itu dari meja Pimpinan ini kita beri *support* kepada Pak Menteri untuk nanti melakukan relaksasi itu Pak kelonggaran-kelonggaran yang mana bisa digeser kemudian dipindahkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi isu pertama apa namanya menangani persoalan sosial di negara ini. Jangan sampai konsen di Covid saja nanti di sana Covid pergi ada persoalan yang lebih mendasar lagi itu kita tidak mau Pak. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak Menteri kalau kemarin kita gagal untuk melakukan rehab panti dan lain sebagainya kita mungkin untuk menjadi legasi dari Pak Menteri mungkin penting juga kita untuk anggarkan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan di luar Covid-19.

Baik para Anggota para Pimpinan, kita beri kesempatan untuk melakukan pertanyaan atau respons saran. Tapi sekali lagi mohon maaf bukan tidak mau memberikan seluas-luasnya kepada para Anggota tapi ini arahan dari Pimpinan DPR, PDIP 2 orang, yang lainnya 1 saja. Silakan jadi silakan nanti untuk memberikan pertanyaan kalau lebih datang dari 1 kecuali PDIP ya mencoba bermusyawarah siapa yang menjadi juru bicara fraksi masing-masing. Kami persilakan dari PDIP Pak Samsu Niang.

F – PDIP (Drs. SAMSU NIANG, M.Pd.) :

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan Komisi beserta seluruh Anggota Komisi VIII.

Yang saya hormati Menteri Sosial serta seluruh jajarannya yang hadir pada hari ini.

Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Menteri sudah jelas dan kita sudah paham. Artinya apa? Sebenarnya ini kita tidak perlu lagi membahas Pak Ketua. Karena sudah Pagu Indikatif terus Raker lagi terus Sekjen lagi terus kembali lagi penyelesaian seperti ini jadi apa unek-uneknya Anggota DPR kemarin itu sudah disampaikan. Jadi tidak perlu lagi dibahas dan saya kira kalau kita lihat tadi anggarannya itu semua adalah kepentingan kemanusiaan. Bansosnya cukup besar dan esensi Anggota DPR duduk di sini memperjuangkan kemiskinan dan rakyat kecil dan itu anggarannya sudah pas semua Pak Ketua. Jadi olehnya itu tidak perlu dibahas. Lebih cepat lebih baik karena apa? Di tujuan kita kesini untuk DPR bagaimana memperjuangkan rakyat kecil begitu dan Kemensos sudah memaparkan 99% untuk bansos begitu saya kira demikian terima kasih Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Sebenarnya Pak Samsu Niang ini salah harusnya terakhir dia ngomong begini Pak Anggota yang lain tidak semangat lagi nanya ini ya silakan Ibu Diah mudah-mudahan sependapat satu fraksi dengan PDIP silakan Bu Diah.

F – PDIP (DIAH PITALOKA S.Sos, M.Si.):

Pembukanya belakangan ini di ganti ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Pak Menteri Sosial dan jajaran.

Kalau di lihat target prioritas nasional ini saya senang juga karena ada anak balita ya kan? Masuk benar-benar kelompok rentan ini dapat angka khusus ya 48.000 penyandang disabilitas fisik, 30.000 anak balita, anak jalanan berhadapan dengan hukum, lalu juga lanjut usia. Dan sebetulnya masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Artinya ini memang target yang ingin kita ingin capai tapi ada banyak yang belum bisa terpenuhi. Misalnya catatan kita ini yang menjadi banyak masukan masyarakat mengenai panti rehabilitasi sosial itu sudah ada tapi memang belum ideal anggarannya. Saya berharap ini tetap diperjuangkan karena bagaimanapun itu menjadi pelayanan publik di wilayah depan bagi Kementerian Sosial mungkin bisa lebih optimal lagi untuk anggaran selanjutnya terutama teman-teman di Banggar.

Yang kedua mengenai apa yang kewirausahaan social. Nah program kewirausahaan sosial kan salah satu program yang sebetulnya ini baru untuk mengganti atau transisi dari PKH ya? PKH yang graduasi. Nah ini juga anggarannya saya lihat masih belum bisa menjadikan program ini menjadi fungsi transformasinya itu jalan begitu, dari PKH graduasi keberdayaan sosial. Sementara ini kalau kita lihat masih sifatnya bantuan kepada keluarga miskin tapi belum kuat faktor pemberdayaannya. Nah ini yang kita berharap nanti anggaran pemberdayaan ini juga, karena tahun depan ini ya ada beberapa catatan perbaikan undang-undang di omnibus law saya berharap juga Kementerian Sosial bisa mengakselerasi kemiskinan menjadi keberdayaan. Dan anggaran akselerasi itu yang belum cukup kuat di dalam target anggaran tahun 2021. Semoga 2022 bisa lebih kuat di sektor pemberdayaan sosialnya.

Dan mungkin juga anggaran bencana perlu kita telaah lebih lanjut karena kesiapan dan juga mungkin perlu sinkronisasi dengan konsepsi Undang-Undang Kebencanaan yang sedang di susun di DPR. Nah hal-hal ini yang di 2021 yang perlu kita bahas lebih mendalam sehingga ada kesiapan kita juga dalam memperjuangkan anggaran-anggaran ini di 2021 perubahan atau di 2022 karena masyarakat sudah menunggu benar ini masalah pemberdayaan ekonomi terutama begitu yang biasa tidak begitu mudah juga ternyata masih masyarakat di luar sistem perbankan masih bisa mengakses untuk bantuan orang miskin terutama bantuan ekonomi. Nah saya pikir Kementerian Sosial kalau bisa mengambil porsi ini bisa lebih kuat itu bagus banget. Jadi dia bisa *bridging begitu bisa menjadi jembatan* dari kemiskinan

menjadi pemberdayaan. Nah itu memang di Kementerian Sosial dari pada Kementerian lain yang perspektifnya lebih *entrepreneur* itu beda dengan Kementerian Sosial itu mungkin catatan saya yang masih ya artinya masih perlu kita perjuangkan lagi untuk kita perkuat di depan. Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Ibu Diah responsnya atau sarannya. Kalau bisa Pak Menteri di awal tahun atau di kuartal pertama Pak Sekjen. Kalau perlu ada sudah realokasi bisa Pak kita ajukan ke Komisi VIII Januari atau Februari kalau misalkan hal-hal yang mendesak tadi perlu dilakukan. Atau pengajuan anggaran tambahan berjalan Pak kan tahun 2020 kan Rp134Triliun banyak sekali tambahan mungkin bisa kita ajukan juga.

Baik kita lanjutkan ke PPP ada tidak PPP yang virtual ada tidak PPP Pak lip sama Pak Kiai Muslich tidak ada ya. Kita lanjut Golkar silakan Golkar yang virtual ada tadi silakan yang virtual kami lanjut dulu ya Ibu Endang ada. Silakan Bu Endang. Bu diunmute dulu Bu. Jangan lanjut-lanjut terus Pak Mukhlas. Bu Endang suaranya tidak ada Bu Endang, suara ini suara Bu Endang tidak banyak makanya tidak jadi anggota DPR. Nanti dulu Bu ya saya tidak paham gerakan mulutnya Bu Endang saya tidak bisa menjelaskan itu,. Baik dari PAN tadi ada Pak Ali Taher tadi kemana ini atau dari Pak Asli Chaidir? Oke baik Gerindra silakan Pak Jeffy Romdonny.

F– P. GERINDRA (H. JEFFRY ROMDONNY, S.E., S.sos., M.Si M.M.) :

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII dan juga Pak Menteri serta jajarannya.

Beberapa hari yang lalu ini terjadi kebakaran di gedung Kemensos ya? Yang alhamdulillah ternyata saya lihat itu memang cepat ditangani jadi memang Kemensos ini cepat tanggap dan saya lihat bersamaan juga katanya mau simulasi juga itu ya Pak? Jadi itu merupakan pembuktian kayaknya pembuktian bahwa Kemensos cepat tanggap dalam menanggapi bencana begitu ya Pak.

Nah kemudian juga pertanyaan saya mungkin terkait itu juga dalam hal ini kan disebutkan ada rencana rehab ya? Nah ini rencana ke depannya seperti apa dan untuk kejadian kemarin itu kerugiannya itu berapa besar ya dari kejadian kebakaran itu?

Kemudian pada Pagu Anggaran Kemensos tahun 2021 yang sebesar 1,28Triliun pada pengalokasian terbesar di gunakan untuk belanja non

operasional atau bansos ini sebesar 99,21%. Kami sangat berharap tentu dalam pelaksanaan realisasi anggaran ini perlu adanya pengawasan dan juga akuntabilitas yang maksimal dari internal maupun eksternal sehingga bansos tersebut benar-benar tepat pada sasaran dan tidak disalahgunakan. Dan terakhir dari paparan tadi ada yang menarik mengenai target prioritas nasional. Kalau saya lihat data BPS per Maret 2019 ini ada lansia yang sekitar 25,6 Juta ya tapi di sini dari program Pak Menteri ini rehabilitasi ini hanya 35.000. Nah pertanyaan saya ini kenapa hanya 35.000? Tentunya dalam hal ini negara harus hadir untuk melindungi setiap warga negaranya terus para lansia. Demikian yang saya sampaikan terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Memang Pak Menteri waktu BNPB di sini laporkan kebakaran hutan tidak ada ini tidak ada, saya bilang beralih Pak menjadi kebakaran gedung sekarang, lanjut Pak Kiai Bukhori Yusuf dari PKS.

F – PKS (K.H. BUCHORI YUSUF, Lc., MA.) :

Baik Pimpinan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati Pak Menteri; dan Seluruh jajaran yang saya hormati.

Ini saya juga agak kagok juga Pak, Pak Menteri ini juga sahabat saya di dapil begitu kalau saya terlalu keras tidak enak pula bersahabat kita. Tapi ini tugas Pak Menteri. Beberapa hal yang saya sampaikan kita semua tahu DPR itu fungsinya adalah selain anggaran dan legislasi dia punya fungsi pengawasan. Karena itu tolong dan mohon kita sebagai DPR untuk mengawasi berbagai program Kementerian itu di berikan kemudahan akses untuk ketemu dengan para pendamping para PKH, PKSK, pekerja sosial, Tagana dan seterusnya. Saya kira itu juga memang perlu dimudahkan kita terutama mereka yang menerima bantuan-bantuan kita secara langsung agar kita bisa ikut bersama-sama mengawasi meningkatkan kualitas dari program kementerian itu yang pertama.

Yang kedua saya setuju dengan Pak Ketua. Pak Yandri tadi memang anggaran yang cukup besar 92,8 Triliun hanya mengalami kenaikan dari anggaran sebelumnya tahun 2019 atau tahun 2020 itu sampai sekitar 49%. Ini saya kira menunjukkan Kementerian sosial ini kementerian yang istimewa Pak. Karena itu Komisi VIII juga saya kira punya peran menjadi peran yang istimewa ini Pak Menteri. Nah oleh karena itu salah satu bentuk keistimewaannya saya kira memang Pak Menteri dengan *wise* dan dengan kebijakannya bagaimana meletakkan relaksasi di dalam penggunaannya di ke depan itu nanti supaya tidak kaku dengan apa yang ada di situ.

Yang ketiga Pak Menteri ini juga titipan dari teman-teman di Poksi PKS bahwa memang pada waktu kita mengajukan beberapa nama untuk menerima BLT Pa, BLT itu yang sesuai dengan dapil masing-masing ini memang masih banyak yang belum bisa terakomodasi. Nah tolong itu nanti juga bisa diganti dengan bansos tahun ini supaya teman-teman DPR atau kita ini tidak dianggap *omdo* atau di anggap sebagai janji palsu. Kalau yang janji palsunya Ayu Ting Ting enak Pak. Kalau janji palsu kalau Anggota DPR ini sedih sekali ini.

Nah selanjutnya mengenai stabilitas Polhukhankam ini saya melihat ini juga merupakan suatu program yang penting. Tapi sayangnya kenapa hanya 200 ini Pak ya jadi ini di halaman 8 itu kan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transportasi pelayanan publik ini hanya ada di 200 keluarga masyarakat di lokasi rawan bencana ini kan kaitannya dengan masalah untuk menyempurnakan desa-desa tangguh ini saya kira ini supaya kemudian juga tidak di hanya di 200 keluarga ini tetapi bisa di tingkatkan.

Dan kemudian yang berikutnya Pak Menteri berkaitan dengan BPNT (bantuan non tunai). Ini ya lagi-lagi kita temukan ini Pak temukan beras-beras yang mestinya tidak layak beberapa waktu yang lalu itu kita istilahkan sebagai beras muter-muter begitu beras Bulog yang sebenarnya tidak layak. Nah beberapa waktu yang lalu kita temukan beras yang bercampur dengan plastik. Saya kira ini juga perlu ada satu kontrol yang lebih ketat dan konteks seperti ini juga saya kira anggota dewan juga punya kewenangan untuk kemudian bisa melihat terus langsung.

Dan yang terakhir sebenarnya saya sejak awal terjadi berita tentang kebakaran saya sudah mendapatkan klarifikasi. Tetapi saya sangat senang kalau ada klarifikasi dari Pak Menteri tentang masalah gedung. Jangan sampai kemudian dihubung-hubungkan dengan kaitannya masalah ini lagi tradisi musim kebakarannya gedung-gedung pemerintah begitu kan belum lagi gedung Kejaksaan Agung kemudian sebentar lagi gedung Kementerian Sosial lalu kemudian gedung mana lagi supaya tidak terjadi spekulasi di publik. Saya kira itu Pak terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Kalau yang Kementerian sosial itu Pak Bukhori apinya belum datang yang mau latihan belakangan datang itu saja tapi langsung ketemu itu. Baik kita lanjut Partai Nasdem silakan Ibu Delmeria.

F – NASDEM (Dra. Hj. DELMERIA):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang.
dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang kami hormati Pak Menteri serta Bapak Dirjen seluruh jajaran yang hadir.

Ketua Komisi VIII, Wakil Ketua Komisi (Pak Moekhlas/Pak Ace).

Teman-teman yang baru hadir di sini.

Kangen juga untuk hadir di kantor walaupun resti Pak resti soalnya sudah di atas 60 itu risiko tinggi Pak. Jadi harus sekali-sekali ke kantor ini karena kangen Pak Menteri saja ini biar ketemu. Tentu apa yang disampaikan sama teman-teman tadi apa yang disampaikan Ketua tadi juga karena Menteri Sosial ini terbuka dengan program-programnya selalu diskusikan dengan Komisi VIII target-targetnya apa yang ditargetkan selama ini tercapai. Tentu juga apa yang disampaikan Pak Samsu Niang tadi apa yang sudah kita bahas sudah ada keberpihakan di sana-sini. Tentu sebagai manusia tidak luput dari khilaf dan salah kadang-kadang sekarang dengan dana Covid-19 yang banyak ini kadang-kadang kita berpikir di Kementerian sosial ini kementerian yang benar-benar yang selama ini tidak terlalu menonjol sekarang Kementerian Sosial itu di mana-mana. Jadi sebutan sampai ke masyarakat desa-desa terpencil-pun tidak ada yang tidak kenal dengan Kementerian Sosial yang selama ini mungkin tidak di kenal masyarakat dengan Covid-19 di kenal.

Tapi jangan kita sudah terkenal kita sudah berbuat di masyarakat jangan juga kita menjadi orang yang sombong begitu. Jadi artinya tentu sebagai manusia apa yang kita perbuat itu kekurangan di sana sini itu tentu ada yang ke ingin kami tanyakan dengan program kita yang telah berlangsung, apa kekurangan-kekurangan yang dirasakan staf-staf Bapak di lapangan? Apa kendala-kendala dan kekurangan yang dirasakan? Tentu ke depan itu yang mau kita perbaiki begitu kita tidak mau dengan apa adanya dengan apa ini yang terjadi kalau data-data dari kemarin sudah kita perbaiki tentu di lapangan apa-apa pun juga kita harus dapat masukan-masukan. Kita juga jangan di kritik terutama dari kepala-kepala daerah barangkali ada masukan-masukan rapat Pak Menteri dengan virtual dengan kepala daerah tentu di sana sini banyak kekurangan kita, banyak target-target kita juga yang tidak tercapai. Mudah-mudahan ke depan itu yang menjadi prioritas kita disamping ada prioritas-prioritas yang lain.

Ada juga seperti titipan dari kami Nasdem Ibu Lisda di PKH dari pesisir selatan itu hal yang kecil. Orang tidak tersandung dengan batu yang besar bisa batu yang besar bisa dielak Pak batu kecil tersandungnya sakit. Ada BPKH yang di usulkan dari pesisir selatan lain yang di usulkan bupati lewat dinas sosialnya lain juga yang keluar SK-nya itu kan hal kecil. Tapi itu yang membikin kadang-kadang hal-hal yang tidak enak di masyarakat.

Mungkin untuk hal yang lain-lainnya barangkali tentu sebagai kami Anggota DPR Komisi VIII apalagi dapil kami yang sangat jauh dari Jawa Pak jangan prioritas ini Jawa dan Jawa Pak. Kami orang Sumatera memang jauh perlu juga perhatian khusus Pak. Apalagi yang pulau-pulau. Kayak kami Nias 5 kabupaten/kota takutnya minta merdeka Nias itu Pak. Minta Provinsi sendiri dari Sumut kan minta Provinsi sendiri dia Pak. Dari Sumut saja sudah minta

berpisah. Itu kan kadang-kadang ada sedikit ancaman untuk Pak Ace biar ada perhatian Pak Menteri biar *marsipature hutanabe*. Mudah-mudahan jadi perhatian dari Pak Menteri dapil kami Sumatera Utara terutama Nias yang di sini Komisi VIII ini memang tidak ada orang asal Nias. Tapi itu bangsa kita orang kampung kita *marsipature hutanabe* Pak Menteri terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada perhatian Pak Menteri Dapil kami Sumut II yang memang daerahnya memang rata-rata miskin Sibolga Nias. Kalau orang pantau itu jarang yang kaya Pak menteri rata-rata di kemiskinan. Sekian dan terima kasih mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Horas

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Tapi kalau yang pesisir selatan tadi itu karena belum dapat giliran saja Bu *insyallah* di bangun semua kan sudah di bangun ada yang belum itu selanjutnya Bu. Jadi tidak tersandung itu. Memang dapil Ibu Delmeira itu Pak Menteri 19 kabupaten/kota ya banyak sekali itu 19 kabupaten/kota luas. Tapi karena dia suaminya walikota ya aman dianya. Silakan kita lanjutkan PKB, bentar dulu Bu belum kami persilakan Bu, Bu jangan dulu oke Bu silakan Bu.

F – PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Pak Ketua.

Beserta seluruh Pimpinan Komisi VIII dan teman-teman yang saya hormati.

Yang saya hormati Bapak Menteri beserta seluruh jajaran.

Tidak banyak yang saya sampaikan. Pertama saya mengapresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Mensos yang mana kita tahu anggarannya cukup besar. Bahkan mendapat tambahan cukup signifikan. Tentu kami hanya berharap bagaimana anggaran yang sebesar itu dalam pendistribusiannya itu benar-benar sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan bahkan saya setuju apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi fleksibilitas daripada anggaran. Dalam artian karena masalah sosial itu masalah yang sangat dinamis bagaimana untuk bisa di arahkan kepada hal-hal yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Saya hanya ingin menyampaikan keluhan saja dari masyarakat kemarin dalam program BLT. Mohon maaf Pak Menteri kami itu kan dapat ada yang di dapil itu di kasih dari kementerian beberapa orang, kemudian saya juga mendapatkan dari Provinsi Jawa timur pada saat itu. Tapi yang dari Provinsi Jawa Timur itu 100 orang 1 pun tidak ada yang keluar. Sedangkan dari Pak Menteri itu juga tidak semuanya keluar ada beberapa yang keluar.

Mungkin sekitar 30% yang tidak keluar. Ini yang ingin saya tanyakan apa kendalanya kok sampai padahal data sudah masuk sudah diverifikasi sudah sesuai tapi kenapa kok tidak bisa keluar? Sehingga saya ini ditagih terus sama masyarakat dapil saya.

Terus kemudian yang kedua termasuk rumah Rutilahu rumah tidak layak huni dan juga KUBE yang kita sudah mengembor-gemborkan bahwa akan ada dana seperti ini. Tapi sampai sekarang juga kita tidak bisa mewujudkan ini apa kendalanya? Saya kira itu saja supaya kita ini yang semula dipercaya oleh masyarakat. Tapi karena kita sudah menjanjikan program yang sudah sepertinya itu *fix* ternyata dalam pelaksanaannya tidak terwujud. Ini yang kami harapkan bagaimana ada solusi terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Anissa Syakur jangan dulu *ngambek* Bu insyaallah ada jalan keluarnya. Nanti kalau wakil rakyatnya cepat *ngambek* bagaimana rakyatnya ya Bu ya terutama yang belum keluar tadi Bu. *Insyallah* Pak Mukhlas Sidik bagian keluar-keluar itu Pak Mukhlas Sidik nanti. Ya silakan kami lanjutkan ke Demokrat Ibu Harmusa.

F – P DEMOKRAT (HARMUSA OKTAVIANI, S.E.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya Ketua beserta Anggota Komisi VIII

Selamat Pak anggarannya tahun 2021 itu tambah dan *alhamdulillah* sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Sosial. Saya sependapat dengan teman-teman yang lain kita mengupayakan kita mendorong Kemensos agar anggarannya bisa maksimal. Kita juga minta tolong agar pelaksanaannya penggunaannya sesuai dengan apa yang telah dirinci oleh Kemensos untuk tahun 2021. Dan seperti yang Bu Anisa bilang tadi Pak untuk program-program ini kenapa Pak kendalanya apa? Sedangkan kita di dapil sudah berteriak-teriak ini dari Kemensos ada program ini, ini dari Kemensos ada bantuan ini. Sedangkan di pusat kalau kita komunikasi dengan Kemensos selalu masih dalam proses, masih dalam proses. Minta tolong Pak agar ini bisa secepatnya direalisasikan. Apalagi kita kemarin hari Selasa di Banggar Kementerian Sosial anggarannya sudah kita setuju. Kita pun juga minta *feedback* dari Kementerian Sosial agar penggunaan dana ini benar-benar bisa tepat sasaran dan tepat guna agar masyarakat juga bisa merasakan oh Kemensos hadir *tagline*-nya seperti itu Pak ya. Dan saya harap itu bukan hanya *tagline* tapi kita juga bisa mewujudkan di tengah-tengah masyarakat bahwa Kemensos benar-benar berhadir di tengah-tengah kita untuk membantu kita apalagi di masa pandemi ini. Mungkin itu saja Pak minta

tolong benar-benar programnya bisa turun bisa terealisasikan dengan tepat. Mungkin itu saja Ketua terima kasih.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Bu Harmusa dari Demokrat, sekaligus memang ini Banggar dari Komisi VIII Pak Menteri daerahnya memang agak sulit itu Blora, Pati sama Grobogan ya? Rembang ya? Ini untuk di catat saja sama Pak Sekjen Pak Hartono. Sudah dia programnya sudah banyak. Silakan lanjut Golkar tadi belum Pak silakan Pak Ali Ridho, minum dulu, lanjut dulu yang lain ke PAN tadi belum Pak Asli Chaidir silakan.

F – PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Pimpinan Komisi VIII beserta Anggota Komisi VIII yang saya hormati.
Pak Menteri Sosial beserta seluruh jajaran yang saya hormati.**

Terima kasih Pimpinan atas waktunya mohon maaf tadi ada gangguan. Saya pada kesempatan ini mungkin tidak berapa beda dengan rekan saya yang pertama Pak Samsu Niang. Memang ini kita sudah bahas tapi tentu juga ada mungkin yang kita harapkan untuk ke depannya lagi. Ini sebagai perbandingan saja Pak Menteri karena juga Pak Menteri juga dulu pernah menjadi Anggota DPR RI. Kemarin selama ini Anggota Komisi VIII ini tidak berapa betul terhadap memberikan bantuan-bantuan yang melalui dari anggotanya sendiri. Karena memang yang dari programnya kementerian itu sudah tepat, sudah benar, sudah bagus, dan banyak rakyat yang senang terhadap bantuan-bantuan yang sudah disahkan oleh Kementerian Sosial. Tetapi rakyat yang mewakili yang kami wakili mereka bertanya juga dari Bapak yang mitranya Komisi VIII Kemnsos apa saja yang Bapak bawa ke kami katanya begitu.

Karena ini maaf Pak ada usulan-usulan yang sudah di minta seperti kawan-kawan yang terdahulu juga di bilang tentang KUBE, tentang Rutilahu itu kita tidak mendapatkan jadinya. Jadi yang sangat menyedihkannya itu ada rekan yang tidak di Anggota DPR RI dia banyak memberikan bantuan mau itu Rutilahu, KUBE dan sosial lainnya itu. Nah itu saja tidak Anggota DPR banyak bantu Pak katanya begitu.

Jadi kita mohon juga depannya seperti kemarin Pak itu kami sangat terbantu sekali dengan Kementerian Agama dapat membantu. Karena memang jelas kami yang menyerahkan semacam sertifikatnya yang mengambilnya mereka ke bank yang bersangkutan. Seperti kemarin kami mendapatkan guru-guru mengaji dari pondok pesantren TPQ dan Madrasah. Dan itu betul-betul menjadi kejutan oleh masyarakat yang kita wakili. Makanya bisa dapat dari Kementerian Sosial juga mungkin salah satu kami bisa

memberikan bantuan ke pondok yatim piatu atau lanjut usia. Yang kami cuma sebagai perantara saja dan kami tetap membesarkan mengatakan bahwa ini adalah uang negara melalui Kementerian Sosial itu tetap kami laksanakan tapi nampak perjuangan kami itu oleh yang kami wakili Pak.

Jadi terima kasih banyak memang selama ini sudah bantu seperti yang telah berjalan selama ini satu saja unggulan kami dari Kementerian sosial tentang apa namanya ada keserasian sosial dan macam-macam lainnya itu/ Itu agak aneh cuma kan 1 saja. Tapi kalau ada beberapa buah yang kami berikan bantuan kepada ke rumah yatim piatu ini tidak berapa banyak pula. Tapi ada gesah kami bahwa dari kami Anggota DPR RI peduli kepada yang dia wakilnya begitu.

Itu saja Pak Menteri mohon maaf kalau tidak berkenan saya cuma sekedar untuk bermohon. Mudah-mudahan kami yang mewakili daerah pemilihan kami ada juga kerja kami. Mereka tidak lihat begitu apa yang dapat dikerjakan oleh Menteri Sosial yang telah distribusikan tapi yang buah tangan dari kami ini yang nampak besar seperti Kementerian Agama kemarin itu tidak tanggung-tanggung Pak kemarin mereka biarpun carut marutnya bermacam-macam kepada Kementerian tersebut. Itu ya Allah kami akan doakan Menteri agama sehat selalu segala macam begitu Pak.

Jadi mohon kepada Bapak Menteri sekali lagi kalau dapat paket-paket yang nampaknya kelihatan oleh masyarakat membantu rumah orang tua yang ada rumah singgah itu maksud saya Pak Menteri terima kasih Pimpinan maaf Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Pak Asli Chaidir memang kalau yang minta begini banyak karena sudah di mulai tadi siapa yang duluan minta-minta tadi. Harusnya cukup ya ini Pak Asli Chaidir cukup saya saja tadi saya tembuskan ke Pak Menteri. Tapi itu biasa akses di dapil Pak tetap kita prosedural kita lalui supaya kita tidak ada hal-hal yang salah dan memang selama ini terutama sembako sudah sangat banyak di berikan kepada Anggota untuk disalurkan kepada dapil masing-masing tapi itu ya tetap kurang saja. Tapi saya kepedulian dari Kementerian sosial sudah bagus. Baik dari Golkar yang terakhir Pak Ali Ridho mau ngomong atau cukup, cukup ya baik dari meja Pimpinan Pak Muklas Sidik cukup, Pak Ace Hasan Syadzily silakan.

WAKIL KETUA KOMISI VIII (Dr. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pak Ketua dan para Anggota Pak Menteri Sosial dan seluruh pejabat Eselon I yang hadir pada kesempatan ini.

Pertama mungkin kita selalu diingatkan bahwa kondisi untuk tahun depan maupun dua tahun yang akan datang ya kemungkinan ini akan terdampak dari Covid-19. Dan oleh karena itu Kementerian Sosial menjadi sangat penting selain untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Tetapi juga implikasi dari berbagai Kementerian Sosial akan dapat menjaga daya beli masyarakat dan juga memperkuat stabilisasi ekonomi di era pandemi seperti sekarang ini. Karena program-program Kementerian Sosial terutama program yang ada di masyarakat tentu harus diarahkan bantuan sosialnya itu pada upaya untuk memastikan bahwa selain pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat juga menjadi *buffer* agar jangan sampai masyarakat akibat dari kondisi ekonomi yang saya kira semua juga harus diakui kemungkinan kita terancam resesi ekonomi pada akhir tahun ini dan moga-moga pada tahun yang akan datang kita cepat sekali pemulihannya. Untuk itu anggaran yang cukup besar dari Kementerian Sosial yang mencapai 92 Triliun untuk tahun 2021 ini kami berharap betul dapat di pergunakan seefisien, seefektif memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan semua harus dilakukan secara terukur terarah dan mencapai target apa yang di inginkan.

Saya membaca dari apa yang di sampaikan oleh Pak Menteri tentang target prioritas nasional ya? Dan saya kira ini memang ini sesuatu yang realistis yang perlu untuk terus menerus kita pertahankan karena ujian dan tantangan buat bangsa ini dalam konteks melakukan/menerjemahkan apa yang menjadi visi misinya Pak Jokowi atau visi misinya pemerintahan ini. Yang waktu itu kita sama-sama di Kebon Sirih dengan Pak Menteri merumuskan tentang upaya melakukan reformasi sistem jaminan perlindungan sosial. Dan saya kira itu secara jelas kenapa KIP kemudian PKH, BPNT, PBI, JKN, KIS tetap di pertahankan karena memang kita harapkan bahwa ini bagian dari upaya kita untuk melakukan reformasi sistem jaminan perlindungan sosial kita yang dalam bahasa Kebon Sirihnya itu adalah melanjutkan reformasi sistem subsidi agar lebih tepat sasaran.

Jadi saya kira jelas sekali ya upaya itu dan salah satunya adalah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang disini di targetkan sebesar 109.600.000 data yang harus termutakhirkan pada tahun 2021. Saya kira ini adalah pondasi dasar dari Kementerian Sosial untuk tahun 2021 untuk program-program yang lainnya. Termasuk nanti Program PKH program BPNT, program KUBE, Program Rutilahu, program panti-panti sosial dan lain sebagainya karena kan basis datanya ini semua.

Oleh karena itu Pak Menteri mohon sekali bahwa nanti pada saatnya dalam hal pemutakhiran data kesejahteraan sosial ini betul-betul menjadi titik utama yang harus betul-betul diselesaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di dalam implementasi program-program yang lainnya. Dan jangan lupa pula bahwa bagi kelompok-kelompok sosial yang disebut PMKS itu (pemerlu masalah kesejahteraan sosial) itu juga cakupannya harus lebih besar. Karena apa Bapak Menteri? Menurut saya ya seperti anak jalanan, seperti anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang membutuhkan perlindungan di era pademi seperti sekarang ini justru ya

bagian dari yang harus dipikirkan. Karena biasanya kan hukum alam kalau ekonomi lagi sulit maka masalah-masalah sosial itu akan selalu muncul. Pemerlu masalah kesejahteraan sosial itu pasti akan semakin meningkat begitu. Oleh karena itu mohon kiranya Pak Menteri ya soal PMKS ini juga menjadi perhatian.

Dan yang terakhir apa yang menjadi catatan teman-teman soal bansos bantuan-bantuan sosial tersebut saya kira Pak Menteri dari kebijakan sosial dengan program *cash transfer* terutama program seperti PKH, BPNT. Sebetulnya itu suatu yang luar biasa ada banyak tembakan yang bisa di dapat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan tidak secara langsung sebetulnya efek masyarakat menjadi *literasi inklusif bank cable* terpenuhi Pak begitu.

Saya sebetulnya ingin menjelaskan kepada Bapak Menteri mungkin di pertimbangkan alangkah lebih baiknya jika *cash transfer* itu yang harus di perbanyak untuk bantuan-bantuan sosial yang lain. Ya karena apa? Sekali lagi karena itu bagian dari kita untuk memastikan adanya literasi perbankan inklusi keuangan yang lebih terbuka terutama akses masyarakat miskin begitu ya.

Tentu kita semua berharap bahwa biasanya bulan September BPS mengeluarkan, Pak Mirza mungkin biasanya tanggal berapa itu Pak Mirza BPS mengeluarkan pengumuman rilis tentang data kemiskinan mudah-mudahan harapan saya dapat tertahan begitu oleh program-program yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Saya kira demikian terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih yang terakhir silakan Pak Ihsan Yunus dari PDIP.

WAKIL KETUA KOMISI VIII (H. M. IHSAN YUNUS, ME. Con. Std):

Terima kasih Pimpinan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang

Salam sejahtera untuk kita semua

**Yang saya hormati Pimpinan; dan
Anggota Komisi VIII Pak Menteri Sosial beserta seluruh jajaran.**

Saya rasa tadi sudah banyak sekali yang di sampaikan oleh kawan-kawan cuma memang karena anggaran kita terbatas maka harus ada prioritas dan tadi Pak samsu Niang sudah mengatakan karena ini sudah bolak-balik ini Pak Sekjen kan dari mulai Pagu Indikatif terus kemudian Banggar terus ke kita lagi balik lagi. Jadi saya rasa tidak banyak yang harus disampaikan lagi. Tapi kalau di lihat halaman 10 ini memang sangat logis dan sangat prioritas

juga kebutuhan anggaran tahun anggaran 2021 dengan kondisi bencana kemudian ekonomi, kemudian balai rehab, kondisi gedung juga apalagi habis kebakaran begitu ya Pak Sekjen ya dan upaya peningkatan pengawasan upaya peningkatan kapasitas. Maka saya usul Pimpinan nanti untuk di kesimpulan agar kegiatan-kegiatan yang belum teralokasi ini dimasukkan. Supaya kalau nanti ada realokasi atau ada tambahan anggaran sudah ada posnya bisa di ajukan. Itu saja Pimpinan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Pak Ihsan Yunus langsung to the point itu langsung minta kesimpulan padahal Pak Menteri belum menjawab. Naik Pak Menteri saya kira sesuai dengan agenda tadi para Anggota sudah paham tidak banyak cakap tadi yang penting sudah mendukung semua. Oleh karena itu kita serahkan kepada Pak Menteri untuk menjawab. Mudah-mudahan sebelum jam 4 rapat sudah selesai dan kita bisa membacakan kesimpulan kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (JULIARI P. BATUBARA):

Izin Pimpinan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya mencoba untuk menjawab mungkin secara umum. Yang pertama sekali lagi saya ingin menyampaikan apabila memang ada program-program yang di usulkan yang sifatnya non reguler silakan mungkin bisa disampaikan kepada saya langsung apabila prosesnya di rasakan lama atau juga bisa melalui Pimpinan. Saya kira sangat terbuka untuk komunikasi dan mohon maaf apabila memang ada pengusulan-pengusulan yang sifatnya non reguler yang belum bisa dipenuhi. Tapi saya yakin teman-teman di sini tidak ada yang menghalang-halangi. Saya pun tidak pernah menghalang-halangi atau membatasi. Instruksi saya jelas kepada teman-teman Eselon I selama memang itu untuk kepentingan orang banyak silakan saja langsung di eksekusi dihalang-halangi atau dilama-lamakan begitu prosesnya. Kalau memang dirasakan lama silakan Pimpinan bisa menegur menterinya langsung.

Yang kedua Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat. Saya kira pada saat berjalan beberapa bulan terakhir ini seperti pertemuan-pertemuan kita sebelumnya memang saya pernah menyampaikan bahwa akibat kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran banyak dari program-program kita yang tergusur. Terus terang saja saya menggunakan istilah tergusur ya. Antara lain KUBE, Rutilahu, ada tetap tapi jumlahnya menjadi sedikit, Nah ini ingin saya sampaikan Pimpinan Anggota Komisi VIII yang terhormat sehingga mungkin dari teman-teman yang sudah memasukkan usulan itu saya *detailnya* satu per satu mohon maaf tidak bisa

mengikuti ada yang mungkin belum bisa dipenuhi. Tapi tolong teman-teman di Eselon I komunikasinya terbuka saja, bisa atau tidak harus di komunikasikan jangan ditahan-tahan. Tapi *insyallah* tahun depan tidak ada lagi Pimpinan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan sehingga beberapa program reguler yang selama ini bisa berjalan tidak harus digantikan lagi oleh program-program lainnya.

Jadi kalau kita lihat di presentasi saya di halaman 7. Sebenarnya di tahun 2021 itu bisa di bilang 95% lebih itu sebenarnya ada di 4 target. Yang pertama target program sembako 18,8 Juta, target PKH 10 Juta, target BST 10juta dan target pemutakhiran DTKS saya koreksi sebenarnya Pak Ketua Pak Ace bukan 109.600.000 tapi karena kita akan naikkan *coverage* menjadi 60% hitungan jiwanya menjadi 160 Juta jiwa. Jadi yang sebenarnya apa namanya kue terbesar anggaran kita di itu. Jadi memang fleksibilitas di lainnya memang tidak terlampau banyak itu memang yang sudah seperti itu. Namun dengan segala hormat dan terima kasih atas dukungan Pimpinan Komisi VIII yang terhormat pada saat nanti berjalan tentunya nanti kita akan berkonsultasi dengan komisi apabila memang kita perlu melakukan realokasi-realokasi.

Namun kami juga ingin menyampaikan secara terbuka dalam kesempatan yang bagus ini. Realokasi anggaran itu tidak terlalu fleksibel apabila menyangkut realokasi dari anggaran yang masuk dalam PEN (Program Pemulihan Ekonomi Nasional) sehingga Kementerian keuangan meminta agar apa namanya efisiensi dari pada PEN yang tidak tersalurkan tidak boleh direalokasikan ke program non-PEN. Nah ini yang terjadi jadi fleksibel iya tapi tidak terlalu fleksibel juga begitu lho.

Nah apabila ini tidak seperti itu otomatis kita akan sangat fleksibel ya jadi anggaran yang sudah dialokasikan untuk program-program yang masuk dalam PEN seperti PKH, kartu sembako itu masuk ke dalam PEN. Apabila setelah sekian bulan lewat ada target yang tidak tercapai ini tidak boleh direalokasikan ke program-program yang non-PEN. Harus dia direalokasikan ke program yang PEN juga ini memang menjadi fleksibel tapi tidak terlalu fleksibel juga.

Nah sehingga mungkin titip kepada teman-teman Banggar di Komisi VIII pada saat mungkin rapat-rapat Banggar dengan Kementerian Keuangan bisa diusulkan. Artinya ini kan sebenarnya sejalan dengan perintah Presiden terkait penyerapan anggaran. Sehingga belum tentu kita tidak bisa apa namanya menyalurkan 100% sesuai target program tersebut termasuk dalam PEN kita kan belum tentu bisa menyalurkannya/merealokasikan kembali lagi ke program PEN yang saya tahu tidak akan tercapai begitu.

Padahal kalau konteksnya adalah penyerapan anggaran untuk mendorong ekonomi harusnya bisa saja begitu supaya kementerian ini ya fleksibel dan di habiskan kepada program yang pasti habis begitu. Tapi ini memang tidak punya fleksibilitas itu mohon izin Pimpinan Anggota Komisi VIII yang terhormat kalau memang disetujui pada rapat-rapat teman-teman Banggar Komisi VIII dengan Kementerian Keuangan ini bisa diusulkan. Saya kira ini tidak hanya untuk kepentingan Kemensos saja pasti kepentingan KL yang lain juga sama jadi bisa fleksibel namanya kita men-set-up belum tentu

tercapai ya. Sehingga kalau tidak tercapai tapi kita tidak bisa menggunakan uangnya untuk yang program-program yang non PEN begitu. Jadi ini akan terjadi sedikit permasalahan di KL lain untuk penyerapan anggaran. Nah ini saya kita titip apa namanya di perjuangkan di teman-teman Badan Anggaran di rapat-rapat dengan Kementerian Keuangan karena ini dampak-dampaknya Kementerian lembaga yang lainnya semuanya pasti kena ini.

Kemudian tadi mengenai Pak Jeffry yang terhormat *alhamdulillah* memang kerugiannya sangat kecil. Mungkin kalau di hitung rupiahnya puluhan juta saja. Itu ada alat yang terbakar dan *alhamdulillah* itu satu ruangan juga tidak terbakar semua dan api dapat di padamkan dalam waktu yang kurang satu jam begitu. Dan kembali lagi kami memang sebetulnya mengusulkan anggaran untuk perbaikan sarpras. Tapi sekali lagi sumber realokasi itu sebagian besar adalah bentuknya PEN. Nah ini sehingga itu juga tidak bisa kita realokasikan antara lain. Terus terang kami juga sebenarnya ingin menggunakan tadinya anggaran tersebut untuk membeli polis asuransi. Tapi ya karena anggarannya dari PEN y ini belum bisa di lakukan saat ini mohon apa namanya dukungan juga dari teman-teman Komisi VIII yang saya hormati ini khususnya Badan Anggaran untuk. Saya kira dengan teman-teman Komisi lain bisa apa namanya perjuangkan hal ini karena KL lain pasti mengalami hal yang sama. Kalau terlalu kaku PEN dengan PEN itu pasti KL lain juga pasti juga akan tersandera juga dalam penyerapan anggarannya.

Kemudian mengenai lansia sebenarnya kalau target di yang tercantum prioritas nasional di halaman 7 ini, ini hanya target pelayanan lansia di rehabilitasi sosial saja. Namun kalau kita masuk ke dalam PKH di situ ada komponen lanjut usia itu sebenarnya ada sekitar 1,1 Juta. Jadi di dalam PKH ada komponen 1,1 juta keluarga ini 1.1juta keluarga yang diberikan bantuan bersyarat. Jadi target yang di sampaikan di sini adalah target yang masuk dalam domain-nya Rehsos tapi kalau kami masuk ke PKH ini sudah masuk juga begitu juga dengan disabilitas jadi karena PKH ini program yang *integrated* komponennya *health related* 4 komponen *education related* 3 komponen dan di dalam 4 komponen yang *health related* itu ada 2 nya lansia dan distabilitas jadi sebenarnya itu sudah *built in* di dalam PKH. Sehingga targetnya tidak hanya di angka-angka yang di halaman 7 di presentasi kami saja.

Untuk stabilitas target untuk warga masyarakat yang terlayani memang itu terbentur masalah anggaran juga yang disetujui adalah memang tidak banyak sehingga memang targetnya. Jadi tidak terlalu banyak.

Tadi juga ada masalah yang menurut saya sangat *urgent* saya juga setuju antara lain kualitas bahan makanan saat ini kami juga sedang sebagai informasi Anggota Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati kami sedang merevisi Peraturan Menteri untuk terkait program sembako BPNT. Memang selama ini apa namanya pengawasan itu lebih banyak dilakukan oleh daerah ya. Sehingga kita ingin membuat satu aturan yang lebih baku yang bisa kita gunakan karena ini menyangkut juga terus terang saja adanya mungkin di daerah tertentu suplier-suplier yang sebenarnya tidak terlalu layak begitu. Ya karena memang kita dari awal memang tidak mengatur masalah supliyer atau penyediannya karena itu sudah masuk ke ranah bisnis. Saya kira Kementerian sosial juga tidak *wise* juga masuk ke dalam ranah pengaturan

masalah suplier bahan makanan ini kita tidak pernah atur. Namun terima kasih masukannya yang akan kita lakukan adalah tentunya kita ingin memastikan sedang kita godok bagaimana agar daerah itu bisa melakukan *monitoring* yang lebih baik terhadap kualitas dari pada suplier dan rencananya di Permensos.

Yang berikutnya juga kami juga ingin memastikan agar sebagian besar daripada bahan makanan yang di beli di E-Warong di daerah tersebut diutamakan dari produksi lokal daerah setempat. Ini kita ingin masukan ke dalam peraturan, juga dalam rangka menggerakkan ekonomi di daerah tersebut. Kami ada lihat di beberapa daerah seperti Kulon Progo di Jogja dan di Bandung kalau tidak salah di Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat kalau tidak salah sebenarnya komoditi yang di jual di E-Warong itu sebenarnya sebagian besar dari daerah situ saya kira ini kan bagus istilah saya uang. Misalnya sekian ratus milyar setiap tahun daerah tersebut ya jangan keluar dari daerah tersebutlah biar muter-muter di situ saja begitu sehingga ini bentuknya Bansos tapi ekonomi juga. Kombinasi antara Bansos dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Tadi dari Bu Anisa mengenai penerima atau usulan-usulan nama BST nanti kami akan tindak lanjuti. Pak Dirjen ya tolong dicek saya kira selama nama-nama tersebut memang datanya *clear and clean* dan sudah kita *cleansing* harusnya tidak apa namanya tidak akan kita tolak. Ibu Harmusa, Pak Chaidir kurang lebih juga sama masalah bantuan mungkin tadi saya sampaikan mengenai kebijakan realokasi anggaran, *refocusing* kegiatan mengakibatkan program reguler kita menjadi korban terus terang. Tapi *insyaallah* tahun depan tidak seperti itu dan apabila ada usulan-usulan yang sifatnya non reguler. Saya kira selama itu untuk kepentingan rakyat banyak di dapil teman-teman pasti kita dukung saya kira teman-teman di Eselon I juga sama dengan saya.

Setuju dengan Ketua Pak Ace mengenai sebetulnya tahun 2021 salah satu program yang paling monumental dari Kemensos adalah bagaimana DTKS ini kita lakukan pemutakhiran besar-besaran artinya yang 40% kita re-verify, re-validasi dan juga menambah 20% lagi dari yang ada sekarang 40% ini kita re-verify re-validasi ada yang *out* ada yang *in* yang *in* ini dari mana antara lain data dari BST data-data dari bantuan sosial kurang lebih itu nanti. Jadi kombinasi termasuk data-data dari bansos yang Pemda berikan ya PBIJK itu total stok baru kita itu ada sekitar 14 Juta ya. Jadi *pre-list* kita nanti kalau kita butuhnya 41 Juta keluarga saat ini 29Juta keluarga stok *pre-list* kita ada 14 Juta. Jadi dengan *pre-list* yang kita sudah pegang. Itu kita tidak harusnya tidak perlu cari-cari lagi ya. Jadi nanti tinggal kombinasi verifikasi dan validasi yang 28 Juta ini ada yang *out* ada yang *in*. Yang *out* ya *out* yang *in* kita ambil dari sini, sebagian dan sisanya kita lihat dari memenuhi target 60 juta yang kita akan penuh. Setuju juga dengan mengenai program-program *cash transfer* tahun depan juga seluruh program adalah *cash transfer* termasuk juga program khusus bantuan sosial tunai.

Saya kira demikian Pimpinan yang saya hormati beberapa jawaban yang bisa saya sampaikan yang lainnya akan kami susulkan dalam bentuk tertulis mengenai tadi Ibu Delmeria juga kemarin saya baru dari Pulau Natuna Bu. Jadi untuk pulau-pulau terluar kami pastikan kita juga mendapatkan

pelayanan yang sama karena mereka punya hak yang sama. Tidak masalah Bu apabila ada yang perlu perhatian-perhatian khusus silakan Bu nanti disampaikan kepada kita *insyaallah* pasti kita layani.

Saya kira demikian prinsipnya Pimpinan Anggota Komisi VIII yang saya hormati prinsipnya kami bekerja tidak sendirian ya teman-teman adalah memiliki konstituen memiliki dapil yang tentunya juga kepanjangan tangan dari kita semua. Jadi silakan dengan teman-teman di Eselon I dan II komunikasi terbuka apabila ada yang ingin disampaikan yang ingin dibantun, saya kira silakan saja teman-teman di Eselon II, juga Eselon I agar terbuka komunikasinya dengan teman-teman Pimpinan maupun Anggota Komisi VIII yang terhormat. Saya kira demikian untuk sementara Pimpinan terima kasih saya kembalikan ke meja Pimpinan

F – PKS (K.H. BUCHORI YUSUF, Lc., MA.) :

Sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Ihsan dulu.

WAKIL KETUA KOMISI VIII (H. M. IHSAN YUNUS, ME. Con. Std):

Saya sedikit mengomentari Pak Menteri kan tadi terkait dengan realokasi anggaran atau efisiensi dari program PEN harus ke program PEN atau PEN harus ke PEN begitu ya? Tapi di halaman 10 ini kan memang anggaran kita ini kalau coba diklusterkan ada 7 kebutuhan lah begitu. Apakah ini kemudian yang 7 ini masuk ke dalam PEN begitu? Itu mungkin satu.

Yang kedua masalah kami juga mendukung masalah BPNT. Kita tidak ingin lagi terjadi ada permasalahan karena semakin banyak BPNT semakin banyak permasalahannya begitu Pak Menteri ya. Jadi kita sangat mendukung Permen yang akan dikeluarkan tapi ya harus sedikit keras Pak Menteri karena kita tahu di daerah ini kan banyak raja-raja kecil juga begitu ya. Saya tidak tahu apakah yang ditindak nanti hanya sekedar *supplier*-nya atau E Warongnya saya rasa dua-duanya harus sama saja begitu kan. Jangan sampai harus ada efek jeralah begitu.

Jadi intinya E-Warong juga tidak sembarangan mengambil suplier dari mana-mana. Nah permasalahannya E-Warong ini kan ya mohon maaf mungkin di daerah banyak titipan juga Pak Menteri. Begitu kan. Punyanya ini punyanya itu sehingga tidak berani untuk di apa namanya ditindak oleh banknya mungkin kalau sebagai admin bank seterusnya. Tapi anggaran ini dari Pak Menteri saya rasa Pak Menteri punya kewenangan untuk itu setidaknya tidaknya intervensi. Itu Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Bukhori silakan.

F – PKS (K.H. BUCHORI YUSUF, Lc., MA.) :

Sedikit Pimpinan saya meng-endorse Pak Ihsan terkait BPNT. Jadi saya kira misalnya kalau beras campur plastik itu kan umumnya beras impor Pak. Jadi bukan beras lokal. Jadi sekali lagi tolong dipastikan memang tadi idealnya adalah semakin diperbesar jumlah yang cash transfer mungkin akan jauh lebih *safety* dan lebih aman sehingga menghindarkan berbagai macam spekulasi-spekulasi yang tidak kita inginkan.

Yang kedua, saya mohon tanggapan Pak Menteri mohon sebagai fungsi pengawasan kita di berikan kemudahan untuk koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap PKH, kemudian pendamping dan juga, TSK, pekerja sosial, Tagana dan seterusnya. Walaupun selama ini sudah berjalan kadang-kadang terjadi ketersendatan Pak. Jadi mohon itu kemudian supaya jadi lebih *clear* dan kemudian supaya lebih *clean*. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik Bapak Ibu terima kasih, jawaban dari Pak Menteri termasuk saran dari Pak Ihsan dan Pak Bukhori terakhir. Itu *insyallah* menjadi perhatian kita semua Pak Menteri beserta jajaran para Anggota dan para Pimpinan kita sudah sampai di agenda ke-4 yaitu pembacaan draf kesimpulan. Mohon ditampilkan mohon nanti diperhatikan kalimat per kalimat maupun angkanya. Kalau ada perbaikan kami persilakan. Nanti ketika draf kesimpulan ini selesai saya bacakan.

**Draft Kesimpulan
Rapat Kerja
Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia
Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2020/2021
Rabu 23 September 2020**

Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Republik Indonesia membahas penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial Republik Indonesia hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan isu-isu aktual disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui penyesuaian RKA K/L Kementerian Sosial Republik Indonesia anggaran 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp.92.817.590.291.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar 2,52 triliun sekian
 - b. Inspektorat Jenderal 33,408 miliar
 - c. Dirjen Pemberdayaan Sosial Rp.406.207.360.000
 - d. Dirjen Rehabilitasi Sosial 1,241 triliun.
 - e. Direktorat Jenderal dan Perlindungan Jaminan sosial Rp.30,773 triliun.
 - f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Rp.57.926.000.000 sekian.
 - g. Badan Diklat dan Rp.384.515.000.000 sekian.

Dengan total yang saya bacakan tadi Rp.92.817.590.291.000

2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar memperhatikan pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memberikan alternatif solusi melalui relaksasi anggaran tahun 2021 untuk beberapa program yang belum teralokasi dalam Pagu Anggaran antara lain:
 - 1)Penguatan revitalisasi Balai Rehabilitasi Sosial dengan standar internasional.
 - 2)Penguatan kesiap-siagaan bantuan darurat peralatan evakuasi kendaraan siap siaga bencana, kampung siap siaga bencana dan pembangunan gudang logistik.
 - 3)Penambahan target kewirausahaan sosial untuk memenuhi ekonomi masyarakat.
 - 4)Penguatan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan, penerimaan, pengaduan dan rujukan dan DTKS.
 - 5)Peningkatan target rumah tidak layak huni atau rehab rumah sederhana.
 - 6)Penguatan, penguasaan, dan akuntabilitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - 7)Rehabilitasi gedung atau bangunan yang sarana dan prasarana perkantoran termasuk penyiapan *open space* dukungan kehumasan dan publikasi, pengelolaan SDM, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
 - 8)Memastikan distribusi bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tepat guna mengingat jumlahnya sangat besar dan perlu basis data yang akurat.
 - 9)Memastikan program-program perlindungan sosial bantuan sosial dan program pelayanan sosial lainnya dapat diukur *output* dan *outcome* serta manfaatnya yang *dimonitoring* dan di evaluasi secara periodik.
 - 10)Mengutamakan bantuan sosial *cash transfer* karena manfaatnya ini sangat di rasakan oleh masyarakat.

Dari Pak Menteri dan jajaran kami persilakan kalau ada perbaikan pengurangan kami persilakan Pak.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (JULIARI P. BATUBARA):

Izin Pimpinan.

Dari kami untuk poin 1 saya kira sudah *clear* sudah tidak ada usulan koreksi. Kemudian untuk poin dua koreksi di poin 2.a bagaimana kalau redaksionalnya itu seperti ini “memberikan alternatif solusi antara lain melalui revisi anggaran tahun 2021 pada tahun anggaran berjalan tahun 2021 untuk beberapa program dan seterusnya memberikan alternatif solusi antara lain melalui revisi anggaran tahun anggaran 2021 pada anggaran berjalan tahun 2021 untuk beberapa program yang belum teralokasi dan seterusnya sampai dengan poin 7” Jadi apa namanya disebutkan saja langsung intinya apa namanya mekanismenya begitu pada saat tahun anggaran berjalan.

Kemudian mencermati beberapa masukan dari Anggota Komisi yang terhormat terkait BPNT mungkin usul untuk memasukkan satu poin kurang lebih bunyinya seperti ini Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian sosial untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan atau *monitoring* terhadap E-Warong dalam program BPNT/ program kartu sembako sehingga apa tadi dijadikan apa namanya masukan bisa Komisi VIII DPR RI mungkin di poin 2e begitu. Komisi VIII DPR RI mendorong Kemensos untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap E-Warong pada program BPNT/program kartu sembako. Demikian usulan dari kami, kami kembalikan ke meja Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang dari Anggota ada? Langsung E mendorong saja karena di sana sudah ada Komisi VIII. Pengawasan yang lebih ketat dalam penyelenggaraan BNPT ya? Terhadap E-Warong ini warong nanti garong garong ujungnya.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (JULIARI P. BATUBARA):

Izin Pak itu Warong pakai o, Warong gotong royong sebetulnya istilahnya ada saudaranya Pimpinan izin.

KETUA RAPAT:

Ada dari Anggota Pak Samsu Niang cukup, ya kalau Pak Samsu Niang berkomentar malah tadi pernyataan kan tidak boleh dibahas yang lain Pimpinan cukup.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (JULIARI P. BATUBARA):

Izin Pimpinan terakhir mungkin ada garis miringnya program sembako atau program kartu sembako.

KETUA RAPAT:

BNPT / program sembako.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (JULIARI P. BATUBARA):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sembako pakai o juga bukan sembakuh. Naik Pak Menteri tanpa saya harus membacakan kembali draf kesimpulan yang sudah mengalami perbaikan baik dari angka maupun kata dan kalimat termasuk penambahan usulan dari Pak Menteri tadi. Saya tanyakan kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran kepada Anggota apakah draf kesimpulan yang sudah saya bacakan tadi dan mengalami perbaikan itu bisa kita setuju menjadi kesimpulan dalam Rapat Kerja hari ini setuju ya setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik Pak Menteri kita sudah sampai di penghujung kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan kata akhir dalam Rapat Kerja hari ini kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (JULIARI P. BATUBARA):

Terima kasih Pimpinan izin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat.

Saya kira tidak banyak yang saya akan sampaikan lagi selain apresiasi dan penghargaan kami di Kementerian Sosial kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang secara kongkret dan nyata telah mendukung dan memberikan masukan yang sangat konstruktif kepada Kementerian Sosial di dalam kami mengemban tugas-tugas kami yang memang sangat berat di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Secara pribadi juga saya selaku

Menteri Sosial selama 11 bulan saya menjadi Menteri Sosial ini saya sangat merasakan dukungan kongkret dan juga masukan yang sangat konstruktif sehingga pekerjaan saya selaku Menteri Sosial juga sangat dimudahkan dan koordinasi yang bagus ini komunikasi yang bagus ini marilah kita teruskan untuk kepentingan kita bersama dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat kita dan juga menuju Indonesia maju.

Saya kira demikian sekali lagi terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati. Terima kasih.

Waasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat sore.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Menteri beserta seluruh jajaran, para Anggota, para Pimpinan baik yang hadir secara fisik maupun virtual.

Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan agenda pada Rapat Kerja hari ini. Kami juga sama Pak Menteri terima kasih atas kerja sama selama ini komunikasi yang sangat bagus sehingga saya meyakini Komisi VIII dan Kementerian Sosial ke depan itu akan sangat baik bahu membahu kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang paling penting ada keterbukaan dan saling memahami satu sama lain itu kita rasakan saya rasa perlu ditingkatkan secara formal maupun informal. Karena sejatinya kita bertugas tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kita sebagai manusia yang diberi tugas oleh negara sejatinya kapan pun dimana pun kita siap berkoordinasi. Sekali lagi terima kasih Para Anggota para Pimpinan dan Pak Menteri beserta seluruh jajaran.

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin* Rapat Kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih.

Waasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16:05 WIB)

Jakarta, 23 September 2020

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**

